HARIAN
UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK
01 MARET 2011
PENDIRI
ARDI, S.Si, Apt
EDISI: SENIN
02 NOVEMBER 2026

BUTON-BUTENG-BUSEL-BUTUR-WAKATOBI-MUNA-MUBAR
KOLAKA-BOMBANA-KENDARI-BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

www.baubaupost.com
www.durasitimes.com

ECERAN Rp 5.000 | BERLANGGANAN RP 100.000/ BULAN | LANGGANAN & IKLAN HUBUNGI HP/WA: 082160543989

Peringatan Sumpah Pemuda di Busel, Safilin Serukan Semangat Pengabdian



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Penguatan karakter, patriotisme, dan kepedulian sosial menjadi pesan utama dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kabupaten Buton Selatan. Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Buton Selatan, Safilin, mengajak generasi muda tidak sekadar mewarisi semangat perjuangan para pendahulu, tetapi juga membuktikannya melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan saat memimpin upacara di SMP Negeri 1 Batauga, Rabu (28/10/2026).

Safilin menilai, tantangan generasi muda saat ini bukan hanya mengikuti perkembangan teknologi dan mendorong kemajuan pembangunan, melainkan juga memastikan kemajuan tersebut berjalan seiring dengan penguatan nilai kemanusiaan. Menurut dia, kualitas suatu bangsa tidak cukup diukur dari pembangunan gedung, kecanggihan teknologi, maupun kekayaan sumber daya, tetapi juga dari karakter dan kepedulian masyarakatnya.

“Kemajuan sejati dimulai dari manusia, dari karakter, dari hati yang mencintai tanah

Lanjut ke Hal: 7



Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP â€“ Sebanyak 16 siswa Pasukan Garuda Bhayangkara (PASGARDA) SMA Negeri 1 Baubau mengikuti Lomba Kreasi Baris-Berbaris (LKBB) di SMK Negeri 5 Surabaya, Jawa Timur, setelah menjalani persiapan intensif sejak 5 Oktober 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi kesempatan kedua bagi ekstrakurikuler itu untuk menguji kemampuan dan kekompakan tim di luar daerah.

Kontingen yang diberangkatkan pada 27 Oktober 2026 itu terdiri atas 10 siswi dan enam siswa. Mereka membawa misi untuk menampilkan kemampuan terbaik sekaligus menjaga nama baik sekolah dan Kota Baubau dalam kompetisi tersebut.

Kepala SMA Negeri 1 Baubau, Samsuriati AH, S.Pd.,

Lanjut ke Hal: 7

Benteng Keraton Buton Dibidik Masuk Warisan Dunia, Baubau Perkuat Diplomasi Budaya



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mulai memperkuat langkah diplomasi budaya untuk mendorong Benteng Keraton Buton memperoleh pengakuan internasional melalui UNESCO. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga warisan sejarah Kesultanan

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Tengah Azhari Jajaki Pendirian Kampus MIPI, Gandeng Akademisi IPDN Perkuat SDM Pemerintahan



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP-Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pemerintahan menjadi agenda yang dibahas Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, bersama jajaran akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus IPDN Cilandak, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut membicarakan rencana pembentukan Yayasan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) sekaligus persiapan pendirian Kampus MIPI sebagai bagian dari pengembangan pendidikan dan tata kelola pemerintahan.

Dalam pertemuan itu, Azhari bertemu Direktur Pascasarjana IPDN, Prof. Dr. Muhadam Labolo, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal MIPI. Pembahasan diarahkan pada penguatan kelembagaan organisasi serta peluang pengembangan institusi pendidikan yang dapat mempertemukan kalangan akademisi, praktisi, dan penyelenggara pemerintahan.

Azhari menyampaikan dukungan terhadap rencana tersebut. Menurut dia, penguatan fondasi keilmuan pemerintahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Langkah ini merupakan ikhtiar bersama dalam memperkuat fondasi keilmuan pemerintahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang tentu akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan

Lanjut ke Hal: 7

BULOG Baubau Gerak Cepat Tertibkan Penyaluran Beras SPHP, Bentuk Satgas Khusus dan Perkuat Pengawasan Nasional

Laporan: Firman



BAUBAU, BP-Perum BULOG memperketat pengawasan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) setelah muncul dugaan penyalahgunaan penyaluran oleh oknum mitra di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Langkah pembenahan dilakukan secara nasional melalui pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus), evaluasi mitra penyalur, serta pengawasan berjenjang untuk memastikan beras pemerintah sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan.

Penguatan pengawasan tersebut juga menjadi perhatian BULOG Cabang Baubau, Sulawesi Tenggara. Kepala Pimpinan Perum BULOG Cabang

Lanjut ke Hal: 7

DPR Kaji Revisi UU Tipikor, Sinkronisasi dengan RUU Perampasan Aset Jadi Sorotan



Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan advokat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Laporan: Rahmat

JAKARTA, Wacana revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kembali mengemuka seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR RI. Komisi III DPR membuka peluang perubahan regulasi tersebut, termasuk mengkaji usulan penyesuaian definisi korupsi dan memasukkan praktik manipulasi nilai transaksi perdagangan atau under-invoicing sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, pembahasan revisi UU Tipikor memerlukan konsultasi dengan berbagai pihak, terutama ahli, peneliti, aktivis, dan praktisi hukum. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum DPR menentukan arah perubahan undang-undang.

Sahroni menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Menurut dia, peluang revisi masih perlu dilihat berdasarkan perkembangan pembahasan dan waktu yang tersedia.

"Setelah itu baru nanti bagaimana merevisi Undang-Undang Tipikor," ujar Sahroni.

Salah satu persoalan yang turut didorong masuk dalam kajian revisi adalah praktik under-invoicing. Praktik ini dilakukan dengan mencantumkan nilai transaksi perdagangan, seperti harga, jumlah, atau volume barang, lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Sahroni menilai praktik tersebut perlu mendapat perhatian dalam kerangka pemberantasan korupsi.

Usulan itu disampaikan Sahroni sehari sebelumnya, Selasa (27/10/2026). Ia menyebut praktik manipulasi dokumen perdagangan tersebut juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. "Saya mendukung usulan memasukkan under-invoicing ke dalam UU Tipikor. Ini sangat perlu dipertimbangkan," katanya.

Pembahasan revisi tersebut tidak terlepas dari kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. DEN sebelumnya menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto agar unsur kerugian negara dikeluarkan dari definisi korupsi. Usulan ini menjadi salah satu materi yang memunculkan kembali perdebatan mengenai konstruksi hukum tindak pidana korupsi.

Kajian tersebut kemudian dibahas dalam pertemuan Luhut bersama jajaran DEN dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril mendorong perubahan UU Tipikor agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang berlaku pada 2026. Ia juga menilai harmonisasi dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) perlu dilakukan.

Secara historis, Indonesia telah beberapa kali memperbarui kerangka hukum pemberantasan korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999 menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1971, kemudian diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan pada 2001 antara lain memperkuat rumusan tindak pidana korupsi dan memperluas instrumen penindakan. Namun, hingga 2026, UU Nomor 20 Tahun 2001 belum mengalami perubahan langsung.

Pada tingkat internasional, penguatan pemberantasan korupsi juga berkembang melalui UNCAC yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 31 Oktober 2003 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005. Konvensi tersebut menjadi instrumen hukum internasional yang mengatur pencegahan korupsi, penegakan hukum, kerja sama lintas negara, serta pemulihan aset hasil kejahatan. Indonesia meratifikasinya melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Sementara itu, pembahasan RUU Perampasan Aset telah memasuki tahapan legislasi di DPR. Pada 6 Oktober 2026, RUU tersebut disepakati menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Tahapan berikutnya dijadwalkan berupa pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah pada masa sidang yang dimulai 10 November 2026. Komisi III menargetkan penyelesaian pembahasan RUU tersebut paling lambat 15 Desember 2026.

Dengan demikian, revisi UU Tipikor berpotensi menjadi bagian dari agenda penataan regulasi pemberantasan korupsi, terutama dalam menyelaraskan ketentuan pidana, mekanisme perampasan aset, dan standar internasional. Namun, keputusan mengenai materi perubahan maupun kelanjutan revisi masih menunggu hasil konsultasi dan pembahasan DPR bersama pemerintah serta para pemangku kepentingan.(*)

Prabowo Dorong RUU Satu Data Indonesia, Kedaulatan Digital Jadi Perhatian



Presiden Prabowo Subianto terima Tim Gabungan Perumus UU Satu Data Indonesia di Istana, hari ini.

Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia bersama Tim Gabungan Perumus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Regulasi tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola data nasional yang terintegrasi, aman, dan akuntabel sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pengelolaan informasi antarlembaga negara. Integrasi data dinilai penting untuk memastikan pemerintah memiliki sumber informasi yang akurat dalam merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya kedaulatan data sebagai salah satu fondasi dalam menjaga keutuhan bangsa. Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap keamanan informasi nasional di tengah meningkatnya pertukaran data melalui sistem elektronik.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi," demikian keterangan yang dikutip dari unggahan akun media sosial Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah unsur legislatif, akademisi, serta kementerian dan lembaga pemerintah. Hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, serta Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan.

Turut hadir Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia IPB University Sofyan Sjaf, serta Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti.

Sekretariat Kabinet menjelaskan, penyatuan sistem data nasional diharapkan mampu meningkatkan ketepatan pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan informasi dalam proses pertukaran data antarlembaga.

"Integrasi data diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih akurat, serta memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber," demikian keterangan Sekretariat Kabinet.

Secara historis, Indonesia telah memiliki landasan kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 12 Juni 2019 dan diundangkan pada 17 Juni 2019. Perpres tersebut mengatur tata kelola data pemerintah melalui empat prinsip utama, yakni standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Di tingkat internasional, penguatan tata kelola data juga telah menjadi agenda berbagai negara. Pada 18 Juni 2013, para pemimpin negara G8 menandatangani Open Data Charter yang mendorong keterbukaan data pemerintah untuk meningkatkan transparansi, inovasi, dan akuntabilitas.

Perkembangan berikutnya terlihat pada 6 Oktober 2021, ketika Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengadopsi rekomendasi mengenai peningkatan akses dan pertukaran data. Kerangka tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan data lintas sektor dengan tetap memperhatikan perlindungan hak individu dan organisasi.

Dalam konteks Indonesia, penyusunan RUU Satu Data Indonesia diharapkan dapat memperkuat landasan pengelolaan data nasional, termasuk memastikan koordinasi antarlembaga berjalan lebih efektif. Regulasi tersebut juga diarahkan agar pemanfaatan data mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa mengabaikan keamanan informasi dan kedaulatan negara. (*)

Wali Kota Kendari Ajak HMI Kawal Pembangunan, KOHATI Didorong Cetak Pemimpin



Laporan: Mashuri

KENDARI, BP- Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.KM., mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah melalui pemikiran kritis, gagasan konstruktif, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat. Ajakan itu disampaikan saat membuka Training Raya HMI Cabang Kendari yang dirangkaikan dengan Intermediate Training (Latihan Kader II/LK II) dan Latihan Khusus Kohati (LKK) di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, Kamis (29/10/2026).

Menurut Siska, pembangunan Kota Kendari tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dan kerja pemerintah. Partisipasi masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan publik.

Ia meminta kader HMI tidak sekadar menjadi peserta dalam kegiatan organisasi, tetapi juga berani menyampaikan ide, gagasan, serta kritik yang membangun. Dengan demikian, organisasi kemahasiswaan dapat menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

"Mahasiswa harus mampu memberikan ide, gagasan, dan kritik yang konstruktif bagi kemajuan Kota Kendari. Kami berharap HMI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal berbagai program pembangunan," demikian pesan Wali Kota dalam sambutannya.

Siska juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Training Raya tersebut. Pemerintah Kota Kendari, kata dia, mendukung kegiatan pengaderan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi muda dan memperkuat peran organisasi kemahasiswaan.

Ia menilai HMI mempunyai posisi penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang telah lama berdiri, HMI memiliki tradisi pengaderan yang berkontribusi dalam melahirkan sejumlah tokoh di berbagai bidang kehidupan nasional.

Training Raya HMI Cabang Kendari sendiri merupakan agenda pengaderan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kader dari aspek intelektual, spiritual, dan emosional. Melalui rangkaian LK II dan LKK, organisasi tersebut berupaya mempersiapkan kader yang memiliki integritas, kemampuan kepemimpinan, serta kepedulian terhadap persoalan umat dan bangsa.

Secara khusus, Siska memberikan motivasi kepada Korps HMI-Wati (KOHATI) agar terus memperkuat kiprahnya dalam pemberdayaan perempuan. Ia berharap kader perempuan HMI mampu mengambil posisi strategis dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, organisasi, dan pembangunan.

"Kami berharap KOHATI terus menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan perempuan. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang intelektual, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan," ujarnya.

Sejarah mencatat, HMI didirikan Lafran Pane bersama sejumlah mahasiswa di Yogyakarta pada 5 Februari 1947. Organisasi ini lahir tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Semangat keislaman dan keindonesiaan menjadi landasan perjuangannya dalam membangun kehidupan bangsa.

Dalam sejarah nasional, gerakan mahasiswa juga memiliki catatan penting pada peristiwa Reformasi 1998. Gerakan tersebut menjadi salah satu kekuatan sosial yang mendorong perubahan politik Indonesia dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana partisipasi mahasiswa dapat menjadi bagian dari dinamika demokrasi dan perubahan masyarakat.

Fenomena serupa pernah terjadi di tingkat internasional. Pada Mei 1968, gerakan mahasiswa di Prancis berkembang menjadi demonstrasi besar yang kemudian melibatkan kalangan pekerja. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak sejarah gerakan sosial modern dan menunjukkan pengaruh mahasiswa dalam mendorong perubahan kehidupan publik.

Melalui Training Raya, Pemerintah Kota Kendari berharap proses pengaderan HMI dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademis, tetapi juga integritas, kepekaan sosial, serta keberanian menyampaikan gagasan. Kaderisasi diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengambil bagian dalam pembangunan daerah dan menjawab tantangan bangsa.(*)

Gubernur Sultra Tekankan Patriotisme, Kegigihan, dan Empati bagi Pemuda Indonesia



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengajak generasi muda memperkuat karakter patriotik, gigih, dan berempati sebagai modal menghadapi tantangan bangsa di tengah perubahan zaman. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu (28/10/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema 'Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia'. Tema tersebut menekankan pentingnya pembangunan kualitas manusia sebagai fondasi kemajuan nasional, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, penguasaan teknologi, maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Andi Sumangerukka membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir. Pesan yang disampaikan menempatkan karakter sebagai salah satu kekuatan utama generasi muda dalam menentukan arah masa depan Indonesia.

Patriotisme, dalam pesan tersebut, tidak cukup diwujudkan melalui simbol atau ungkapan kecintaan kepada negara. Nilai itu perlu tercermin dalam pengabdian, tindakan nyata, serta kontribusi melalui ilmu pengetahuan dan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain patriotisme, pemuda juga diharapkan memiliki kegigihan dalam menghadapi kesulitan dan kegagalan. Ketangguhan tersebut diperlukan agar generasi muda tidak mudah menyerah ketika menghadapi persaingan, perubahan sosial, maupun tantangan pembangunan.

Karakter ketiga yang ditekankan adalah empati. Kemampuan memahami keadaan orang lain dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dinilai penting untuk menjaga nilai kemanusiaan di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

Rangkaian upacara turut diwarnai penampilan seni budaya Nusantara oleh siswa SMAN 6 Kendari. Mereka membawakan Tari Kawanua dari Sulawesi Utara, tarian Dayak dari Kalimantan Barat, Tari Cakalele, Tari Lenso, serta permainan bambu tradisional dari Maluku.

Pertunjukan tersebut menghadirkan keberagaman tradisi daerah sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia. Kehadiran seni budaya dalam peringatan itu sekaligus memperlihatkan bahwa semangat persatuan dapat dirawat melalui pengenalan dan pelestarian identitas budaya bangsa.

Upacara dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua DPRD Sultra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Sultra, kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur TNI-Polri, aparatur sipil negara, serta organisasi kemasyarakatan.

Secara historis, Sumpah Pemuda berakar dari Kongres Pemuda I yang berlangsung pada 30 April hingga 2 Mei 1926. Pergerakan tersebut kemudian mencapai momentum penting melalui Kongres Pemuda II pada 27â€“28 Oktober 1928 di Batavia, yang melahirkan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia.

Ikrar tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan nasionalisme Indonesia. Di tengah keberagaman suku, bahasa, dan daerah, para pemuda kala itu memilih persatuan sebagai landasan perjuangan menuju kemerdekaan yang akhirnya diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Semangat pemberdayaan pemuda juga menjadi perhatian dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi World Programme of Action for Youth pada 1995 sebagai kerangka kebijakan untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan. Selanjutnya, melalui Resolusi 54/120 pada 1999, PBB menetapkan 12 Agustus sebagai Hari Pemuda Internasional.

Dalam konteks tersebut, peringatan Sumpah Pemuda ke-98 di Sulawesi Tenggara menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran generasi muda. Tantangan ke depan tidak hanya menuntut kecakapan intelektual dan teknologi, tetapi juga karakter, kepedulian sosial, serta komitmen menjaga persatuan dan kemanusiaan.(*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Kenang Doa Ibunda Wabup, Sebut Ada Jasa di Balik Kemenangan Pilkada



Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Kepergian Faasia Binti La Djifai, ibunda Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa, meninggalkan kenangan tersendiri bagi Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra. Di tengah suasana duka di Desa Kakenauwe, Kecamatan Lasalimu, Rabu (28/10/2026), Alvin mengenang doa dan dukungan almarhumah ketika dirinya bersama Syarifudin berjuang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga akhirnya dipercaya memimpin Kabupaten Buton.

Alvin hadir langsung di rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia menilai dukungan almarhumah menjadi bagian dari perjalanan politik yang dilalui bersama Syarifudin sebelum keduanya memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pilkada.

"Ibu Faasia, ibunda dari Pak Wakil Bupati, adalah orang baik. Terakhir saya berjumpa dengan beliau pada saat kami berdua sedang berjuang berkampanye. Alhamdulillah, kami diberikan kemenangan. Kemenangan kami berdua tidak luput dari jasa dan doa beliau," kata Alvin di hadapan keluarga dan pelayat.

Menurut Alvin, kehadirannya bukan sekadar menyampaikan penghormatan terakhir, melainkan juga sebagai bentuk penghargaan atas kebaikan dan dukungan yang pernah diberikan almarhumah. Ia mengajak keluarga serta masyarakat yang hadir untuk mendoakan agar almarhumah memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Sementara itu, Syarifudin Saafa mengungkapkan bahwa ibundanya meninggal dunia pada Selasa (27/10/2026), pukul 20.45 WITA, setelah menjalani perawatan medis selama delapan hari. Berbagai upaya pengobatan telah dilakukan keluarga sebelum akhirnya mengikhlaskan kepergian almarhumah sebagai ketentuan Allah SWT.

Di tengah kesedihan, Syarifudin mengaku bersyukur karena seluruh anak dan cucu dapat mendampingi ibundanya hingga saat-saat terakhir. Ia menyebut almarhumah mengembuskan napas terakhir dengan mengucapkan kalimat tauhid.

"Alhamdulillah, sebelum mengembuskan napas terakhir, kami semua anak-anak dan cucunya berada bersama beliau. Beliau mengembuskan napas terakhir dengan mengucapkan La ilaha illallah. Kami sekeluarga ikhlas melepas kepergian beliau," tutur Syarifudin.

Atas nama keluarga, Wakil Bupati Buton itu menyampaikan terima kasih kepada kerabat, sahabat, dan masyarakat yang telah hadir serta memberikan doa. Ia juga memohon maaf apabila semasa hidup ibundanya pernah melakukan kesalahan kepada siapa pun. Pihak yang merasa masih memiliki urusan dengan almarhumah, termasuk terkait utang-piutang, diminta menyampaikannya kepada keluarga.

Syarifudin berharap nilai-nilai kebaikan dan pesan yang pernah disampaikan ibundanya semasa hidup dapat diteruskan oleh keluarga maupun orang-orang yang mengenalnya. Dengan demikian, kebaikan tersebut diharapkan tetap menjadi amal jariah bagi almarhumah.

Almarhumah Faasia Binti La Djifai kemudian dimakamkan selepas salat Zuhur di pemakaman keluarga yang terletak di belakang rumahnya di Desa Kakenauwe, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir menyampaikan belasungkawa, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sterry Fendy Andih, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., Wakil Ketua I DPRD Buton Hasni, Wakil Ketua II DPRD Buton Dr. La Subu, S.H., M.H., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si.

Kehadiran juga terlihat dari Kepala BPS Buton Agung Septianto Wibowo, S.ST., para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Buton, serta keluarga dan kerabat almarhumah. Suasana tersebut mencerminkan solidaritas keluarga, kerabat, dan unsur pemerintahan daerah dalam memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah.

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, penghormatan kepada orang yang meninggal dan dukungan terhadap keluarga yang berduka merupakan bagian dari nilai sosial yang telah lama dipelihara. Praktik takziah, doa bersama, serta penyelesaian tanggung jawab almarhumah menjadi bentuk kepedulian sosial yang juga dikenal dalam berbagai tradisi masyarakat di dunia. Di Buton, nilai kekeluargaan dan kebersamaan tersebut kembali terlihat melalui kehadiran masyarakat dan jajaran pemerintahan di rumah duka keluarga Wakil Bupati. (*)

Wabup Adam Basan Dorong Pemuda Buton Tengah Berani Berkarya untuk Indonesia Maju pada Upacara Hari Sumpah Pemuda ke 98



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-98 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk mendorong generasi muda memperkuat karakter kebangsaan, meningkatkan kapasitas diri, serta mengambil peran nyata dalam pembangunan. Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, S.Sos., menegaskan pentingnya patriotisme, kegigihan, dan empati sebagai nilai utama yang harus dimiliki pemuda dalam menghadapi tantangan zaman.

Pesan tersebut disampaikan Adam Basan saat bertindak sebagai pembina upacara peringatan HSP ke-98 di halaman Kantor Bupati Buton Tengah, Labungkari, Rabu (28/10/2026). Upacara berlangsung dengan mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia" dan diikuti jajaran pemerintah daerah, unsur pemuda, serta pelajar.

Dalam amanatnya, Adam membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir. Pesan yang disampaikan menempatkan pembangunan karakter sebagai fondasi kemajuan bangsa. Kemajuan, menurut Menpora, tidak cukup diukur melalui pembangunan gedung, kecanggihan teknologi, ataupun kekayaan material, tetapi harus bertumpu pada kualitas manusia.

"Kemajuan sejati bukanlah tentang gedung yang menjulang tinggi, teknologi yang semakin canggih, atau kekayaan yang berlimpah, melainkan dimulai dari manusia, dari karakter," demikian pesan Erick Thohir dalam sambutan yang dibacakan Adam Basan.

Menpora juga mengingatkan bahwa pemuda harus memiliki keberanian untuk menetapkan cita-cita, kesungguhan dalam bekerja, serta kemampuan menjaga kepekaan sosial. Kekuatan karakter, dalam konteks tersebut, tidak hanya tercermin dari keberanian memimpin, tetapi juga kesediaan melayani dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

"Saya berharap kalian berani bermimpi setinggi langit, bekerja sekeras mungkin, dan menjadi manusia yang kuat tanpa kehilangan kelembutan hati. Jadilah generasi yang berani memimpin, tetapi juga bersedia melayani. Generasi yang mampu berdiri tegak untuk bangsanya," demikian kutipan amanat Menpora.

Pesan tersebut memiliki relevansi dengan sejarah lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ikrar kebangsaan itu merupakan hasil Kongres Pemuda II yang berlangsung pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Para pemuda dari berbagai organisasi dan latar belakang daerah menyatukan tekad melalui tiga ikrar: satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa persatuan menjadi kekuatan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Semangat yang dibangun para pemuda hampir satu abad lalu tidak hanya berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi landasan bagi generasi berikutnya untuk menjaga keutuhan bangsa dan menjawab tantangan pembangunan.

Dalam perkembangan internasional, perhatian terhadap peran pemuda juga menjadi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada 1985, PBB menetapkan Tahun Pemuda Internasional dengan tema Participation, Development and Peace atau Partisipasi, Pembangunan, dan Perdamaian. Selanjutnya, 12 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pemuda Internasional melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 54/120 pada 1999.

Kehadiran jajaran pemerintah daerah, unsur pemuda, dan pelajar dalam upacara di Labungkari menjadi bagian dari peringatan tersebut. Momentum ini sekaligus mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memperkuat persatuan, mengembangkan kemampuan, melahirkan inovasi, serta berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Buton Tengah.

Peringatan HSP ke-98 di Buton Tengah pun tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Nilai patriotisme, kegigihan, dan empati yang diangkat melalui tema nasional diharapkan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata, sehingga pemuda tidak hanya menjadi penerus, tetapi juga bagian dari penggerak perubahan di daerah maupun tingkat nasional.(*)

BPOM Raih Empat Penghargaan AHI 2026, Inovasi Digital Perkuat Layanan Publik



Peliput: Andina L

SURAKARTA, BP- Transformasi pelayanan informasi publik dan penguatan komunikasi digital mengantarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meraih empat penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2026 di Surakarta, Kamis (8/10/2026). Penghargaan tersebut diraih BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Bandar Lampung melalui inovasi keterbukaan informasi, pelayanan publik, serta pengembangan kanal digital.

Empat penghargaan itu terdiri atas dua penghargaan untuk BBPOM di Yogyakarta dan dua penghargaan bagi BBPOM di Bandar Lampung. Capaian tersebut memperlihatkan upaya satuan kerja BPOM di daerah dalam mengembangkan pelayanan informasi yang lebih mudah diakses, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BBPOM di Bandar Lampung meraih Gold Winner kategori Kanal Digital (Website) melalui SAPA LAMPUNG Subsite Digital. Institusi tersebut juga memperoleh Silver Winner kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif melalui inovasi BAGUS Impact! Mengubah Data Menjadi Dampak: Dari Transparansi Meraih Kepercayaan Publik Paripurna.

Sementara itu, BBPOM di Yogyakarta memperoleh Gold Winner kategori Pelayanan Informasi Publik: Ruang Informasi Publik Inklusif & Modern. Penghargaan lainnya adalah Bronze Winner kategori PPID Terbaik: Keterbukaan yang Bergerak, dari Informasi, Menjadi Layanan, Dampak, dan Kepercayaan Publik.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, orientasi utama lembaga bukan sekadar memperoleh pengakuan, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik.

"BPOM adalah pelayan masyarakat, oleh karena itu kami ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di seluruh Indonesia," ujar Taruna Ikrar.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pengembangan layanan digital yang dilakukan masing-masing balai. Kepala BBPOM di Bandar Lampung Heri Bagus Purnomo menjelaskan, SAPA LAMPUNG dan website lampung.pom.go.id kini menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kedua kanal itu diarahkan untuk memperkuat transparansi melalui informasi yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan publik.

Adapun BBPOM di Yogyakarta mengembangkan pendekatan komunikasi langsung melalui inovasi Aksi Gendarku Bebas Boraks. Kepala BBPOM di Yogyakarta Ani Fatimah Isfarjanti menyebut inovasi tersebut mengusung konsep pelayanan satu ruang untuk beragam kebutuhan informasi publik. Pelaksanaannya ditopang empat pilar tata kelola yang mencakup penguatan kapasitas, kualitas layanan, monitoring, dan evaluasi.

Dalam rangkaian AHI 2026, Etty Rusmawati yang mewakili BBPOM di Yogyakarta juga menjadi narasumber workshop bertema Menerjemahkan Kebijakan Menjadi Komunikasi yang Dipahami. Ia menekankan bahwa komunikasi kebijakan tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi harus memastikan masyarakat memahami substansi dan tindakan yang perlu dilakukan.

Dari sisi historis, BPOM dibentuk sebagai lembaga pemerintah nondepartemen melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Kepala BPOM pertama, Sampurno, dilantik pada 30 Januari 2001. Dalam perkembangannya, kelembagaan BPOM diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Sementara itu, landasan nasional keterbukaan informasi publik semakin kuat setelah pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2008.

Pada tingkat internasional, keterbukaan informasi juga memperoleh pengakuan sebagai bagian penting dari tata kelola demokratis. UNESCO menetapkan 28 September sebagai Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi pada 2015, sebelum Majelis Umum PBB mengakuinya pada 2019. Agenda tersebut menekankan pentingnya akses informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Founder sekaligus CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan, yang menyerahkan penghargaan kepada para pemenang, mengingatkan bahwa capaian dalam AHI harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi insan humas. "Malam ini mari kita rayakan bukan hanya sebagai sebuah kemenangan dalam Anugerah Humas Indonesia, melainkan juga ajang untuk menyatukan seluruh insan humas Indonesia untuk terus bergerak maju, membangun transparansi, dan menguatkan kepercayaan publik di tengah tantangan zaman yang terus berubah," ujarnya.

Prestasi tahun ini melanjutkan capaian BPOM pada AHI 2025 ketika lembaga tersebut memperoleh penghargaan sebagai Institusi Terpopuler di Media Sosial 2025. Taruna Ikrar menegaskan, rangkaian penghargaan itu bukan menjadi titik akhir, melainkan dorongan untuk membangun budaya kerja yang profesional, responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)

BPJS Kesehatan Realisasikan Rp5,1 Triliun untuk Bayar Klaim Rumah Sakit, Rp10 Triliun Disiapkan Lagi

Peliput: Firman

JAKARTA, BP-BPJS Kesehatan telah merealisasikan pembayaran klaim fasilitas kesehatan sebesar Rp5,1 triliun dari total Rp10 triliun dana bantuan pemerintah untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Sementara itu, sisa Rp4,9 triliun masih diproses untuk pembayaran klaim rumah sakit yang sedang menjalani verifikasi, dengan target penyelesaian paling lambat akhir Oktober 2026.

Realisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang hingga 1 Oktober 2026 telah mencakup lebih dari 284,8 juta penduduk atau lebih dari 98 persen populasi Indonesia.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bantuan tahap pertama tersebut diterima pada 14 Oktober 2026. Hingga 23 Oktober 2026, sebanyak Rp5,1 triliun telah digunakan untuk membayar klaim fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Dana Bantuan untuk Kecukupan DJS Kesehatan tersebut kami tegaskan hanya untuk pembayaran fasilitas kesehatan. Karena itu, penggunaan dana dilakukan sesuai tujuan penyalurannya dan dicatat secara terpisah dari pencatatan keuangan rutin BPJS Kesehatan," kata Rizzky dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).

Menurut dia, pemisahan pencatatan keuangan merupakan langkah untuk memastikan setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Sebelum pembayaran dilakukan, seluruh klaim harus melewati verifikasi, termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pembayaran klaim tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Regulasi itu mengatur pembayaran klaim paling lambat 15 hari kalender setelah dokumen dinyatakan lengkap. Dalam praktiknya, rata-rata waktu pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan sepanjang 2025 mencapai 13,6 hari kalender.

Di luar bantuan tahap pertama, pemerintah juga merencanakan pencairan dana bantuan tahap kedua sebesar Rp10 triliun pada November 2026. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembayaran klaim fasilitas kesehatan agar kesinambungan pelayanan kepada peserta JKN tetap terjaga.

Besarnya kebutuhan pembiayaan tersebut tidak terlepas dari perkembangan kepesertaan JKN sejak pertama kali diberlakukan pada 1 Januari 2014. Program yang dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS itu pada tahap awal menjangkau sekitar 121 juta peserta atau 48 persen penduduk Indonesia.

Dalam perkembangannya, JKN menjadi salah satu instrumen utama perlindungan sosial nasional. Untuk mendukung pelayanan kepada lebih dari 284,8 juta peserta, BPJS Kesehatan kini bekerja sama dengan 23.873 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.222 rumah sakit, serta 7.234 fasilitas kesehatan penunjang, termasuk apotek.

Pengalaman Indonesia tersebut juga menjadi bagian dari perkembangan sistem jaminan kesehatan universal di tingkat internasional. Jerman, misalnya, telah memperkenalkan asuransi kesehatan sosial wajib secara nasional pada 1883 melalui kebijakan Kanselir Otto von Bismarck. Sementara Thailand memperluas kebijakan cakupan kesehatan universal pada 2001 dan mengukuhkannya melalui National Health Security Act 2002. Kedua pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perluasan perlindungan kesehatan membutuhkan sistem pembiayaan dan kelembagaan yang berkelanjutan.

Di tengah perluasan cakupan kepesertaan tersebut, BPJS Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165.

Rizzky menegaskan, pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan peserta, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga pelayanan rujukan di rumah sakit. Dengan demikian, dukungan pembiayaan dan kelancaran pembayaran klaim diharapkan mampu menjaga kesinambungan layanan kesehatan bagi masyarakat.(*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi
Baubau Post
www.baubaupost.com

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupostt2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim
Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Tiga Gugatan Persoalkan Ijazah Gibran, MA Kabulkan Kasasi Subhan Palal

JAKARTA, BP-Legalitas dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal, Jumat (30/10/2026). Putusan tersebut menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran tidak sah, sementara perkara lain terkait dokumen pendidikannya juga pernah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Rangkaian gugatan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan persoalan hukum yang perlu dicermati, yakni keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan, pemenuhan persyaratan pencalonan, serta kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa perkara. Putusan MA dalam perkara Subhan menjadi perkembangan terbaru, setelah sebelumnya gugatan serupa menghadapi proses hukum di sejumlah lembaga peradilan.

Dalam perkara bernomor 742/K/TUN/2026, Subhan mengajukan kasasi pada 22 September 2026 setelah gugatannya tidak diterima PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui putusan tertanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan tersebut. Subhan menyatakan pemberitahuan putusan diterimanya melalui sistem elektronik pengadilan.

"Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi," kata Subhan.

Dalam gugatannya, Subhan mengajukan tiga tuntutan, yakni meminta seluruh gugatan dikabulkan, menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, serta meminta dokumen tersebut ditarik dari pihak yang memegangnya, yakni Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

Perkara tersebut bermula dari penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen itu menjadi salah satu dasar administrasi penyetaraan pendidikan Gibran setelah menempuh pendidikan di luar negeri.

Sebelumnya, gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran juga diajukan kepada MK melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara yang diajukan 12 pihak, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana,



Tiga Gugatan Persoalkan Ijazah Gibran, MA Kabulkan Kasasi Subhan Palal

diputus pada 6 Oktober 2026 dengan amar permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres.

Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran yang telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada Oktober 2024.

Di luar perkara tersebut, terdapat gugatan Mercy Sihombing melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana, di PTUN Jakarta. Gugatan yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan itu kemudian diupayakan untuk dicabut. Denny menyampaikan bahwa pihaknya ingin melihat kesungguhan kementerian menghadirkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan.

"Tetapi, kami ingin lihat kesungguhan dari kementerian seperti apa? Mau tidak mereka menghadirkan bukti-bukti dasar suket itu? Sampai minggu lalu itu tidak dihadirkan," kata Denny, Kamis (29/10/2026).

Tim Hukum Gibran Paparkan Riwayat Pendidikan

Menanggapi polemik tersebut, tim kuasa hukum Gibran memaparkan riwayat pendidikan kliennya melalui salindia dan salinan dokumen pendidikan dalam persidangan di PTUN Jakarta serta konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).

Anggota tim kuasa hukum, Adil Supatra Akbar, menjelaskan bahwa Gibran mengikuti program prauniversitas atau pathway di UTS Insearch, Australia, yang kini bernama UTS College. Lembaga tersebut menerbitkan Certificate of Attendance yang menerangkan Gibran telah menyelesaikan 90 persen dari keseluruhan mata pelajaran. Dokumen itu kemudian digunakan MDIS Singapura sebagai dasar transfer kredit ketika Gibran melanjutkan pendidikan di lembaga tersebut.

"UTS Insearch mengatakan melalui Certificate of Attendance-nya bahwa betul Pak Gibran adalah pelajar di sekolah kami dan beliau telah menyelesaikan sebanyak 90 persen (total mata pelajaran)," jelas Adil, sebagaimana dikutip Antara, Kamis (29/10/2026).

Setelah menyelesaikan program prauniversitas di MDIS, Gibran memperoleh Advanced Diploma dan melanjutkan pendidikan tinggi di University of Bradford melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan Singapura tersebut. Adil menyebut Advanced Diploma itu memiliki jenjang yang setara dengan Advanced Level (A Level), yang digunakan sejumlah negara sebagai standar penerimaan mahasiswa perguruan tinggi.

Persyaratan Pendidikan dan Konteks Internasional

Persoalan ini berkaitan dengan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Aturan tersebut menjadi landasan administratif yang harus dipenuhi setiap pasangan calon dalam proses pencalonan.

Dalam konteks historis, Indonesia telah menerapkan pemilihan presiden secara langsung sejak Pemilu 2004. Sejak itu, persyaratan pencalonan, termasuk kualifikasi pendidikan, menjadi bagian dari mekanisme demokrasi elektoral yang terus diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pada 2017, ketentuan pendidikan minimal SMA atau sederajat kembali ditegaskan melalui UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Secara internasional, persoalan pengakuan kualifikasi pendidikan lintas negara juga telah berkembang menjadi perhatian bersama. UNESCO dan Dewan Eropa mengadopsi Lisbon Recognition Convention pada 1997 untuk mendorong pengakuan kualifikasi pendidikan tinggi secara adil. Selanjutnya, UNESCO mengadopsi Konvensi Global tentang Pengakuan Kualifikasi Pendidikan Tinggi pada 25 November 2019 yang mulai berlaku pada 5 Maret 2023. Kerangka tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pengakuan pendidikan lintas negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan perkembangan putusan MA tersebut, perhatian publik kini tertuju pada tindak lanjut hukum dan administratif terhadap dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, keabsahan surat penyetaraan sebagai objek sengketa perlu dibedakan dari status jabatan Wakil Presiden dan persoalan hukum lain yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Salinan lengkap pertimbangan MA serta respons resmi kementerian menjadi bagian penting untuk memahami konsekuensi hukum putusan tersebut.(*)

KPK Sita Uang Tunai Saat Geledah Dua Kantor Bea Cukai di Semarang

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah, Jumat (30/10/2026). Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi di sektor cukai yang kini telah menyeret sembilan orang sebagai tersangka.

Penggeledahan di dua lokasi tersebut dilakukan setelah KPK menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor, aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, sebagai tersangka. Penyidik menduga barang-barang yang ditemukan berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap seluruh barang bukti yang diamankan. Uang tunai yang disita juga masih dalam proses penghitungan sehingga jumlah pastinya belum diumumkan.

"Hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di wilayah Semarang. Dua lokasi yang dilakukan penggeledahan yakni di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah," kata Budi melalui keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026).

Selain mengamankan uang tunai, penyidik membawa sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diharapkan dapat memperkuat pembuktian sekaligus mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Budi menjelaskan, penetapan Dedi Congor sebagai tersangka merupakan perkembangan terbaru dari perkara dugaan suap importasi barang dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai yang mulai diungkap KPK pada Februari 2026. Untuk kepentingan penyidikan, KPK juga telah



mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi guna mencegah Dedi bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Yang bersangkutan diketahui telah beberapa kali dipanggil dan diperiksa oleh penyidik.

Dengan perkembangan tersebut, jumlah tersangka dalam rangkaian perkara ini mencapai sembilan orang. Sebelumnya, KPK menetapkan tujuh tersangka, yakni mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai periode 2024â€"Januari 2026, Rizal; Kasubdit Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono; serta Kasi Intelijen DJBC, Orlando.

Lima tersangka lainnya pada tahap awal adalah Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; pegawai Ditjen Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo; pemilik PT Blueray, John Field; dan Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan. Dalam proses hukum perkara tersebut, beberapa tersangka telah menjalani persidangan dan dijatuhi hukuman, sementara lainnya masih menjalani proses peradilan.

KPK kemudian mengembangkan penyidikan melalui dua surat perintah penyidikan (sprindik) berbeda dan menetapkan dua tersangka tambahan. Salah satunya Gatot Heroe, Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai, yang telah ditahan pada Agustus 2026. Tersangka berikutnya adalah Dedi Congor, pejabat fungsional Bea Cukai Madya pada DJBC Kementerian Keuangan.

Budi menegaskan, penyidikan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan tersebut masih terus berjalan. KPK akan menelaah setiap barang bukti yang diperoleh, termasuk hasil penggeledahan di Semarang, untuk memperkuat pembuktian dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Sebagai catatan historis, persoalan integritas di lingkungan kepabeanan bukan isu baru di Indonesia. Majalah resmi Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada 1968 pemerintah pernah menghadapi persoalan penyelewengan dan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai. Sementara itu, pada tingkat internasional, Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization/WCO) mengadopsi Deklarasi Arusha pada 7 Juli 1993 di Tanzania, yang kemudian direvisi pada 2003. Deklarasi tersebut menjadi pedoman global untuk memperkuat integritas kepabeanan melalui transparansi, otomatisasi pelayanan, audit, pengawasan, dan penegakan hukum. (*)

16 Siswa PASGARDA SMAN 1 Baubau Bertolak ke Surabaya, Bidik Prestasi LKBB

M.M., mengatakan pihak sekolah memberikan dukungan penuh terhadap partisipasi siswa. Sekolah berharap pengalaman kompetisi ini tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memperkuat karakter dan mental peserta didik.

Menurut Samsuriati, PASGARDA merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada pembinaan keterampilan baris-berbaris. Program tersebut dikembangkan sebagai wadah untuk menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok.

Pembinaan PASGARDA juga memiliki keterkaitan dengan tradisi baris-berbaris yang berkembang dalam sejarah militer dunia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa formasi baris-berbaris telah dikenal sejak sekitar 3000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Pada masa itu, gerakan dalam formasi teratur digunakan untuk menjaga koordinasi pasukan. Seiring perkembangan zaman, tradisi tersebut turut diterapkan dalam kegiatan seremonial dan pembinaan kedisiplinan.

Di Indonesia, tradisi kedisiplinan dan formasi pasukan juga memiliki perjalanan sejarah melalui pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Gagasan pembentukan pasukan tersebut muncul pada 1946 melalui Mayor Husein Mutahar atas arahan Presiden Soekarno. Sejarah ini menjadi salah satu gambaran bagaimana keterampilan baris-berbaris berkembang sebagai bagian dari pendidikan kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan.

Bagi PASGARDA SMA Negeri 1 Baubau, keikutsertaan tahun ini merupakan pengalaman kedua dalam kompetisi LKBB. Sebelumnya, tim tersebut pernah mengikuti perlombaan di Sukabumi. Samsuriati berharap pengalaman di Surabaya menjadi kesempatan bagi para siswa untuk meningkatkan kemampuan, memperluas pengalaman, serta membawa pulang hasil yang membanggakan.

"Dalam perlombaan beregu, yang dilihat bukan hanya siapa yang paling bagus secara individu, tetapi bagaimana keseluruhan tim bisa tampil kompak dan bekerja sama," ujar Samsuriati saat diwawancarai Baubau Post, Selasa (27/10/2026).

Ia juga berharap seluruh anggota tim dapat menjaga semangat, menjunjung sportivitas, serta membawa nama baik sekolah selama mengikuti kompetisi. Pihak sekolah mengharapkan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan para siswa kembali ke Kota Baubau dalam keadaan sehat dan selamat.(*)

BULOG Baubau Gerak Cepat Tertibkan Penyaluran Beras SPHP, Bentuk Satgas Khusus dan Perkuat Pengawasan Nasional

Baubau Wilayah Sulawesi Tenggara, Ritno, menegaskan bahwa penertiban distribusi merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga integritas penugasan pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap program stabilisasi pangan.

Menurut Ritno, seluruh mitra penyalur harus mematuhi ketentuan distribusi dan harga jual. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada proses penyaluran, tetapi juga mencakup evaluasi jaringan distribusi, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi salah satu saluran penjualan beras SPHP kepada masyarakat.

"Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran," tegas Ritno kepada Baubau Post, Jumat (30/10/2026).

Untuk memperkuat langkah tersebut, BULOG membentuk Satgas Khusus penertiban penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas ini bertugas memantau jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra, serta memastikan setiap tahapan penyaluran berjalan sesuai prosedur. Seluruh jajaran BULOG di daerah juga didorong meningkatkan pengawasan internal guna mempersempit peluang terjadinya penyimpangan.

Kebijakan pengawasan ini memiliki landasan historis dalam tata kelola pangan nasional. BULOG dibentuk pada 1967, kemudian memperoleh mandat stabilisasi harga beras pada 1969. Dalam perkembangannya, pemerintah menggunakan berbagai instrumen pengendalian pasokan dan harga, termasuk program SPHP yang dilaksanakan sejak 2022 untuk menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan cadangan pangan dan distribusi yang tertib merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional.

Pada tingkat internasional, gejolak harga pangan dunia pada 2007-2008 menjadi salah satu pelajaran penting mengenai kerentanan sistem pangan. Lonjakan harga komoditas serealia, termasuk beras, memicu kekhawatiran terhadap pasokan dan daya beli masyarakat di berbagai negara. Pengalaman tersebut memperkuat pentingnya cadangan pangan, pengawasan rantai distribusi, serta kebijakan stabilisasi harga untuk menghadapi gejolak pasar global.

Ritno mengatakan BULOG akan terus membenahi tata kelola penyaluran SPHP dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Perusahaan juga mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas. "Kami berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi," ujarnya.(*)

Peringatan Sumpah Pemuda di Busel, Safilin Serukan Semangat Pengabdian

air, dari jiwa yang tidak menyerah, serta kepedulian terhadap sesama," ujar Safilin di hadapan peserta upacara.

Ia menekankan tiga nilai yang perlu menjadi pegangan generasi muda, yakni patriotisme, kegigihan, dan empati sosial. Patriotisme harus diwujudkan melalui pengabdian kepada bangsa dan daerah. Kegigihan tercermin dari kemampuan menghadapi kesulitan tanpa mudah menyerah, sedangkan empati diwujudkan melalui kepekaan terhadap persoalan masyarakat dan kesediaan membantu sesama.

"Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya, kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya, dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya," tegasnya.

Pesan tersebut memiliki relevansi dengan sejarah lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ikrar kebangsaan itu merupakan hasil Kongres Pemuda II yang berlangsung pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Para pemuda dari berbagai organisasi dan latar belakang daerah menyatukan tekad melalui tiga ikrar: bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak penting pembentukan identitas kebangsaan Indonesia.

Dalam konteks internasional, perhatian terhadap peran strategis generasi muda juga berkembang melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Majelis Umum PBB pada 1999 menetapkan 12 Agustus sebagai Hari Pemuda Internasional atau International Youth Day, yang pertama kali diperingati pada 2000. Momentum global tersebut menjadi sarana meningkatkan perhatian terhadap partisipasi pemuda dalam pembangunan, perdamaian, dan kehidupan sosial.

Upacara di SMP Negeri 1 Batauga tersebut turut dihadiri staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh pemuda, aparatur sipil negara (ASN), serta para siswa yang mengenakan pakaian adat daerah. Kehadiran peserta dengan busana tradisional menjadi simbol penghargaan terhadap keberagaman sekaligus upaya menjaga warisan budaya lokal.

Safilin berharap generasi muda Buton Selatan semakin berani mengambil peran dalam pembangunan daerah dan nasional, baik melalui kepemimpinan, kreativitas, maupun pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa semangat persatuan, patriotisme, dan kepedulian harus terus dipelihara agar pemuda tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga bagian dari penggerak perubahan menuju Indonesia yang bersatu, beradab, dan maju.(*)

Bupati Buton Tengah Azhari Jajaki Pendirian Kampus MIPI, Gandeng Akademisi IPDN Perkuat SDM Pemerintahan

publik di daerah," ujar Azhari.

Ia berharap komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kalangan akademisi senior IPDN dapat terus berlanjut sehingga rencana pendirian yayasan dan kampus tersebut dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam memperluas jejaring akademik dan praktisi pemerintahan di tingkat nasional.

Secara historis, pendidikan kader pemerintahan di Indonesia telah berkembang sejak masa sebelum kemerdekaan. Sejarah resmi IPDN mencatat, pendidikan pamong praja memiliki akar sejak 1920. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang pada 17 Maret 1956. Lembaga tersebut kemudian berkembang melalui sejumlah perubahan kelembagaan hingga menjadi IPDN pada 2004.

Sementara itu, MIPI sebagai organisasi profesi ilmu pemerintahan dibentuk di Jakarta pada 22 Oktober 1991 untuk menghimpun akademisi, pakar, praktisi, dan pemerhati pemerintahan. Dalam perkembangannya, organisasi tersebut mengemban misi memperkuat penguasaan ilmu pemerintahan secara konseptual maupun praktis serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengalaman internasional juga memperlihatkan pentingnya pendidikan khusus administrasi publik dalam membangun kapasitas aparatur negara. Di Prancis, misalnya, Ã‰cole nationale d'administration (ENA) didirikan pada 1945 untuk memperkuat sistem pendidikan dan rekrutmen pejabat senior negara. Konteks historis tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan pemerintahan telah lama menjadi bagian dari upaya membangun institusi publik yang profesional.

Melalui penjajakan ini, Pemkab Buton Tengah berharap pengembangan Yayasan dan Kampus MIPI dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pendidikan, pengkajian, dan pengembangan praktik pemerintahan. Namun, pendirian kedua lembaga tersebut masih berada pada tahap pembahasan dan persiapan.(*)

Benteng Keraton Buton Dibidik Masuk Warisan Dunia, Baubau Perkuat Diplomasi Budaya

Buton sekaligus memperkenalkan identitas dan peradaban masyarakat Buton kepada dunia.

Komitmen itu mengemuka dalam Simposium Budaya Buton yang dibuka Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsina Bolu, M.Sc., mewakili Wali Kota H. Yusran Fahim, di Kota Baubau, Rabu (28/10/2026). Forum tersebut mengangkat tema "Benteng Wolio Kesultanan Buton: Melestarikan Warisan, Memajukan Diplomasi Budaya, dan Membangun Dukungan Global Menuju Warisan Dunia UNESCO."

Dalam sambutannya, Hamsina menegaskan, pelestarian budaya bukan sekadar mempertahankan peninggalan masa lalu, melainkan menjaga identitas dan kesinambungan peradaban untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut dia, kekayaan sejarah, tradisi, dan kebudayaan Buton merupakan aset penting yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun masa depan, tetapi juga bangsa yang mampu menghormati, merawat, dan memperkenalkan warisan masa lalunya kepada dunia," tegas Hamsina.

Ia mengatakan, upaya memperkenalkan kebudayaan Buton ke tingkat internasional membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, tokoh adat, akademisi, budayawan, dan berbagai pemangku kepentingan. Simposium tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan, pendalaman kajian sejarah, serta perumusan rekomendasi konkret untuk memperkuat pelestarian warisan budaya.

Ketua Panitia Simposium Budaya Buton sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Baubau, Abduh, S.TP., M.Si., menjelaskan, gagasan pengusulan Benteng Keraton Buton menuju pengakuan warisan dunia mulai dirintis pada 2025. Menurut dia, langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengakuan terhadap situs bersejarah Kesultanan Buton dari tingkat nasional menuju panggung internasional. Dalam keterangan panitia, benteng tersebut telah memperoleh pengakuan sebagai cagar budaya nasional sejak 2021.

Secara historis, Benteng Keraton Buton atau Benteng Wolio merupakan salah satu peninggalan penting peradaban Kesultanan Buton. Pembangunannya berlangsung sejak abad ke-16 dan disempurnakan pada masa pemerintahan Sultan Buton berikutnya. Kawasan ini memiliki panjang sekitar 2,7 kilometer, dilengkapi 12 pintu gerbang atau lawa dan 16 bastion atau baluara. Selain berfungsi sebagai pertahanan, kawasan benteng menjadi pusat pemerintahan dan permukiman masyarakat Kesultanan Buton.

Dari perspektif sejarah nasional dan internasional, upaya pelestarian tersebut memiliki relevansi dengan pengakuan dunia terhadap warisan peradaban. Indonesia meratifikasi Konvensi Warisan Dunia UNESCO pada 6 Juli 1989, setelah konvensi itu disahkan pada 16 November 1972 di Paris. Hingga kini, Indonesia memiliki 10 situs yang tercatat dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO, termasuk Borobudur dan kompleks Candi Prambanan yang ditetapkan pada 1991. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya kajian sejarah, perlindungan situs, serta komitmen pelestarian jangka panjang dalam proses pengusulan warisan dunia.

Simposium yang dihadiri unsur pemerintah daerah se-Kepulauan Buton, pimpinan DPRD, Forkopimda, akademisi, budayawan, tokoh adat, tokoh agama, diaspora Buton, dan pemerhati budaya itu diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Melalui kerja sama lintas sektor, Benteng Keraton Buton diharapkan tidak hanya terpelihara sebagai peninggalan sejarah daerah, tetapi juga semakin dikenal sebagai bagian dari kekayaan peradaban dunia.(*)

Senin, 02 November 2026 | BAUB AU POST | www.baubaupost.com

Antrean SPBU Memanjang, Pemkot Baubau Awasi Penjualan Kembali BBM Subsidi



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Praktik pembelian BBM bersubsidi secara berulang untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM, mulai dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga pedagang eceran, guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan penyaluran tepat sasaran.

Kebijakan penertiban itu diperkuat melalui Surat Edaran Wali Kota Baubau Nomor 22/SE/HK/2026 tentang Penertiban Penjualan dan Penyaluran BBM Subsidi di Kota Baubau. Surat edaran yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026 tersebut telah disosialisasikan melalui pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kota Baubau, L.M. Zainal Abidin K., SKM., M.Kes., mengatakan penertiban menyasar SPBU, masyarakat umum yang menjual kembali BBM bersubsidi, serta pedagang eceran.

"Targetnya adalah SPBU, masyarakat umum yang menjual BBM subsidi, termasuk para pedagang eceran yang melakukan penjualan. Secara aturan, hal tersebut tidak diperbolehkan," kata Zainal kepada Baubau Post, Selasa (27/10/2026).

Sebelum menerbitkan surat edaran, Pemkot Baubau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 30 September 2026. Langkah tersebut merupakan respons atas laporan masyarakat mengenai antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat di sejumlah SPBU.

Dalam pemeriksaan itu, tim menemukan aktivitas pedagang eceran yang menjual kembali BBM bersubsidi. Hasil wawancara dengan sejumlah pedagang juga memperlihatkan belum meratanya pemahaman mengenai larangan penjualan BBM subsidi.

"Sebagian pedagang mengetahui bahwa menjual BBM subsidi itu dilarang, tetapi ada juga yang mengaku tidak mengetahui adanya larangan tersebut," ujar Zainal.

Pemerintah juga menyoroti dugaan praktik pembelian BBM subsidi secara berulang di SPBU, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi. Praktik tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap panjangnya antrean kendaraan.

"Kami sudah melakukan pemantauan di beberapa SPBU. Ini menjadi perhatian pemerintah karena antrean cukup panjang. Kami terus melakukan pemantauan dan pengawasan," katanya.

Surat edaran tersebut telah ditembuskan kepada unsur Forkopimda dan disampaikan kepada seluruh SPBU serta organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Baubau. Pemkot berharap sosialisasi dan pengawasan dapat meningkatkan kepatuhan seluruh pihak dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Langkah pengendalian distribusi BBM subsidi bukan persoalan baru dalam kebijakan energi nasional. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai penyesuaian sejak 2005, termasuk pembatasan jenis BBM yang disubsidi dan pengendalian volume konsumsi. Pada 2014, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 untuk mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM dengan mempertimbangkan ketepatan sasaran pemberian subsidi.

Di tingkat internasional, persoalan subsidi energi juga menjadi perhatian. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan subsidi bahan bakar fosil eksplisit secara global mencapai 730 miliar dolar AS pada 2024. Data tersebut memperlihatkan besarnya tantangan pemerintah berbagai negara dalam mengelola subsidi energi agar manfaatnya dapat diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pemkot Baubau mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM bersubsidi secara berlebihan untuk kemudian dijual kembali. Pengawasan distribusi akan terus dilakukan guna menjaga ketersediaan bahan bakar, mengurangi praktik penyalahgunaan, dan memastikan masyarakat memperoleh BBM sesuai peruntukannya.(*)

Pedagang Pasar Baubau Klaim Belum Temukan Beras Oplosan, Pengawasan Diminta Diperketat



Pewarta: Firman

BAUBAU, BP-Pedagang beras di Pasar Wameo dan Pasar Karya Nugraha, Kota Baubau, memastikan belum menemukan indikasi peredaran beras oplosan di lingkungan perdagangan mereka. Meski demikian, kepatuhan terhadap standar mutu, ketepatan takaran, dan ketentuan harga dinilai perlu terus dijaga guna melindungi konsumen sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap distribusi beras.

Kepastian tersebut disampaikan sejumlah pedagang yang selama ini menjalankan usaha perdagangan beras, termasuk menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog. Mereka mengaku menjalankan aktivitas perdagangan sesuai ketentuan pemerintah dan tidak melakukan pencampuran beras untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Di Pasar Karya Nugraha, Rusmini menegaskan tidak pernah menerima maupun menemukan beras oplosan selama menjalin kemitraan dengan Bulog Baubau. Ia menganggap praktik pengoplosan bukan hanya melanggar ketentuan perdagangan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat yang membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami tidak berani mengoplos, menjual, bahkan menerima beras oplosan karena itu sangat merugikan masyarakat," kata Rusmini.

Pedagang lainnya di Pasar Wameo, Madiani, juga menyampaikan hal serupa. Dengan pengalaman berdagang selama 16 tahun sejak 2010, ia mengaku belum pernah menemukan beras oplosan. Pasokan beras yang diperdagangkannya selama ini didatangkan dari Makassar, Kendari, dan Bulog. Ia menyebut aktivitas jual beli di Pasar Wameo belakangan cenderung sepi.

Madiani menilai kehadiran beras SPHP memberikan alternatif bagi masyarakat, terutama kelompok konsumen yang membutuhkan beras dengan harga lebih terjangkau. Program tersebut dinilai membantu menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok di tengah dinamika harga pangan.

"Jadi, beras SPHP ini sangat membantu masyarakat karena harganya murah," ujar Madiani saat diwawancarai Baubau Post, Jumat (30/10/2026).

Farida, pedagang beras lainnya di Pasar Wameo, memastikan penjualan beras SPHP di tempatnya mengikuti ketentuan penyaluran pemerintah. Pembelian dibatasi maksimal dua karung untuk setiap kepala keluarga, dengan tetap menyesuaikan aturan yang berlaku.

"Alhamdulillah aman, Pak. Kita menjual beras sesuai arahan pemerintah. Untuk beras SPHP, kita jual sesuai ketentuan. Sejauh ini, di Pasar Wameo belum ada praktik penjualan beras oplosan yang kami temukan," kata Farida.

Sementara itu, Asmawati, yang telah dua tahun bermitra dengan Bulog Baubau, memastikan beras SPHP yang dijual kepada masyarakat mengikuti ukuran dan ketentuan takaran. Ia menegaskan tidak ada penambahan maupun pengurangan volume beras dalam proses penjualan.

Persoalan mutu dan keaslian beras sendiri bukan hanya menjadi perhatian di tingkat lokal. Secara internasional, Codex Alimentarius yang dibentuk melalui kerja sama Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan standar beras melalui Standard for Rice CXS 198-1995 sejak 1995. Standar tersebut mengatur karakteristik mutu beras untuk konsumsi manusia, termasuk persyaratan keamanan dan kelayakan pangan.

Di Indonesia, penguatan stabilisasi pasokan dan harga beras dilakukan melalui program SPHP. Kebijakan ini memiliki landasan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen. Pelaksanaannya ditugaskan kepada Perum Bulog sejak 2023, dengan realisasi penyaluran pada tahun pertama mencapai sekitar 1,196 juta ton beras secara nasional.

Keterangan para pedagang di dua pasar tradisional Baubau tersebut menjadi gambaran kondisi yang mereka temui selama menjalankan usaha. Namun, pengakuan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa seluruh beras yang beredar di wilayah Baubau bebas dari praktik pengoplosan. Pemeriksaan lapangan, pengujian mutu, serta pengawasan distribusi oleh instansi berwenang tetap diperlukan agar kualitas dan keamanan pangan masyarakat benar-benar terjamin. (*)